

**KELOMPOK KAJIAN
PERLINDUNGAN
SOSIAL DAN
TENAGA KERJA**

Muhammad Hanri,

Ph.D.

hanri@lpem-feui.org

Nia Kurnia Sholihah, S.E.

nia.kurnia@lpem-

feui.org

DAFTAR ISI

Kondisi Kemiskinan dan
Ketimpangan Indonesia
Satu Tahun Terakhir – 1

Kondisi Ketenagakerjaan
Indonesia Satu Tahun
Terakhir – 2

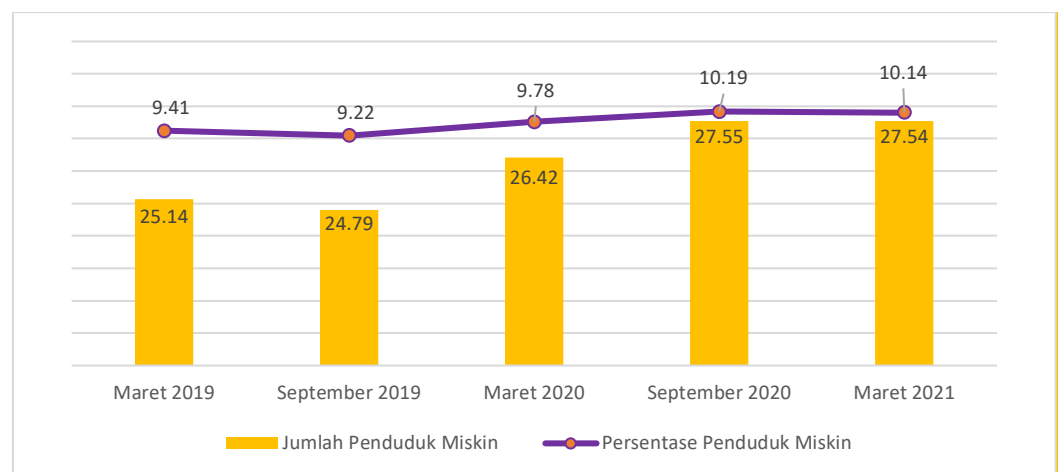
Peran Penting
Pemerintah Melalui
Stimulus dan Bantuan
dalam Program PEN – 4

RINGKASAN

Dalam perkembangannya menghadapi pandemi COVID-19, Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Upaya pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mulai menunjukkan hasil yang memberikan pengaruh pada penurunan laju kemiskinan dan pengangguran Indonesia di awal tahun 2021. Ke depannya, upaya yang diteruskan oleh pemerintah ini diharapkan semakin optimal dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran pada akhir 2021.

Kondisi Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Satu Tahun Terakhir

Krisis di sektor kesehatan akibat adanya pandemi COVID-19 turut memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk di antaranya adalah memberikan dampak bagi kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Hal ini terlihat pada bagaimana angka kemiskinan pada September 2020 meningkat dibandingkan dengan pada Maret 2020. Terlebih jika dibandingkan dengan persentase dan jumlah penduduk miskin Indonesia yang sebelumnya terus mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir. Kondisi peningkatan angka kemiskinan ini merupakan akibat dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada April 2020 yang menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum sehingga memengaruhi pendapatan dan konsumsi masyarakat.



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (juta orang) dan Persentase Penduduk Miskin (%)

Sumber: BPS (2021), diolah

Stimulus melalui PEN yang dialokasikan pada 2020 mulai dirasakan dampaknya terhadap beberapa indikator seperti kemiskinan dan ketimpangan pada awal 2021.

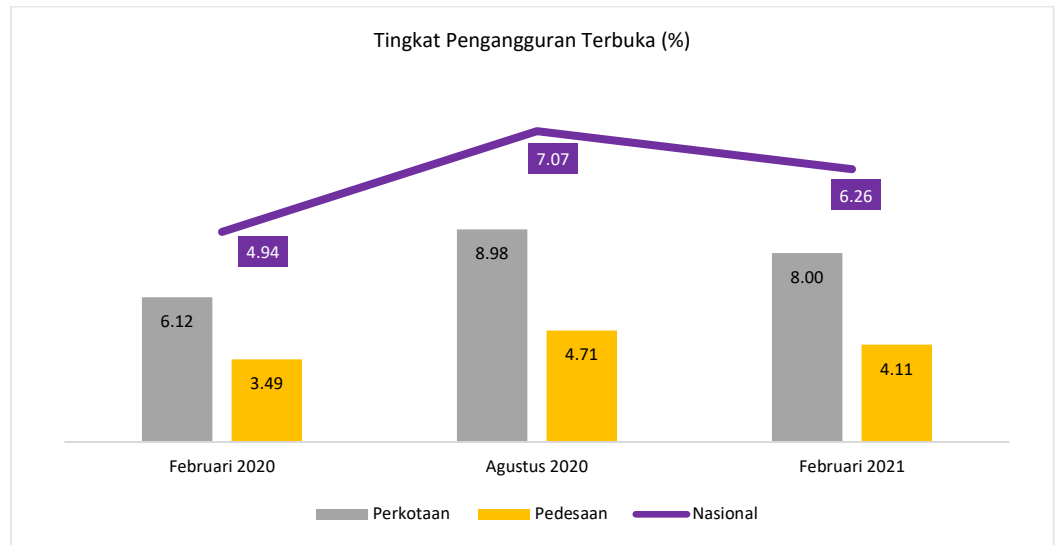
Kemiskinan, ketimpangan dan TPT meningkat pada Agustus-September 2020 tetapi terpantau menurun pada Maret 2021.

Pemerintah Indonesia merespon krisis akibat pandemi ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi dampak pandemi yang dirasakan oleh masyarakat. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan Rp695,2 triliun untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang salah satu tujuannya adalah menjaga tingkat konsumsi masyarakat di masa pandemi. Anggaran PEN paling besar dialokasikan untuk perlindungan sosial (33%) dan UKM (17%). Penyaluran PEN yang membutuhkan proses verifikasi penerima bantuan atau stimulus mulai banyak dilakukan pada akhir Juni 2020, sehingga pada bulan September 2020, masih belum terlalu berdampak. Pada akhir bulan September 2020, realisasi anggaran PEN untuk perlindungan sosial dan UMKM masing-masing baru mencapai 67% dan 48%. Meningkatnya angka kemiskinan dan ketimpangan pada periode ini diduga salah satunya merupakan akibat dari efek *multiplier* stimulus PEN yang belum dirasakan di masyarakat.

Dengan peningkatan realisasi anggaran pada akhir tahun 2020 yang mencapai 72%, upaya pemulihan ekonomi melalui pemberian stimulus oleh pemerintah mulai menunjukkan hasil. Hal ini terutama dirasakan oleh masyarakat di level bawah yaitu kelompok masyarakat yang paling terdampak akibat adanya pembatasan kegiatan ekonomi. Dugaan ini didukung dengan perbaikan jumlah dan persentase penduduk miskin serta ketimpangan secara total pada Maret 2021 (0,384) dibandingkan dengan ketimpangan pada September 2020 (0,385).

Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia Satu Tahun Terakhir

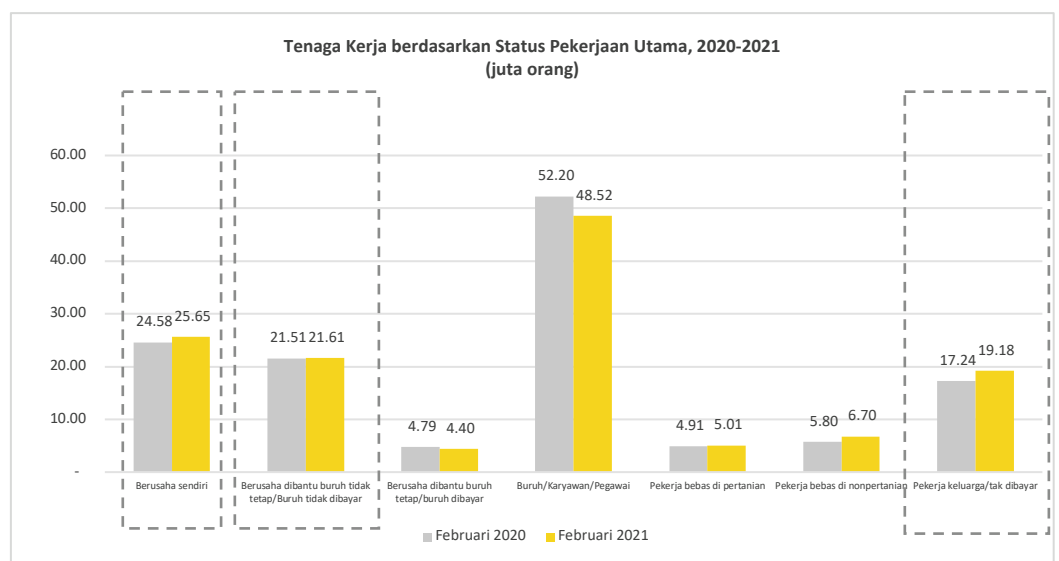
Di sisi lain, pembatasan aktivitas masyarakat juga memengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia. TPT pada Agustus 2020 (7,07%) tercatat meningkat tajam karena kontraksi ekonomi yang terjadi akibat pandemi. Upaya pemerintah juga dilakukan pada sisi *supply* dengan menjaga permintaan tenaga kerja menggunakan berbagai stimulus seperti berbagai insentif pajak untuk sektor usaha (Rp116,31 triliun) dan bantuan untuk UMKM (Rp120,61 triliun). Studi yang dilakukan oleh LPEM UI dan Himbara (2020) menunjukkan bahwa penempatan dana pemerintah di Himbara untuk membantu restrukturisasi kredit UMKM mencegah UMKM untuk melakukan pengurangan pekerja. Meskipun demikian, upaya ini belum optimal menahan laju peningkatan TPT pada Agustus 2020.



Gambar 2. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia

Sumber: BPS (2021), diolah

TPT terlihat mengalami perbaikan pada periode Februari 2021. Hal ini diduga karena stimulus dari PEN mengalami peningkatan realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 dan terlihat keberhasilannya di awal tahun 2021. Tercatat bahwa di akhir 2020, realisasi PEN untuk stimulus usaha mencapai 45% dan bantuan untuk UKM mencapai 93%. Di sisi lain, jumlah penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 juga mengalami penurunan pada Februari 2021 (19,10 juta orang) dibandingkan dengan Agustus 2020 (29,12 juta orang). Penurunan paling besar terjadi pada jumlah orang yang bekerja dengan pengurangan jam kerja akibat pandemi (8,31 juta orang).



Gambar 3. Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama, 2020-2021

Sumber: BPS (2021), diolah

Jumlah buruh/karyawan/pegawai mengalami penurunan pada 2021 dibandingkan 2020. Jumlah penduduk yang bekerja sendiri dan bekerja untuk keluarga mengalami kenaikan.

Munculnya usaha baru perlu mendapat perhatian pemerintah agar tidak luput dari bantuan karena skema bantuan yang ada belum mengakomodir kelompok ini.

Selain itu, jika dilihat dari tenaga kerja berdasarkan status pekerjaan utama, jika dibandingkan antara Februari 2020 dan Februari 2021, terlihat adanya penurunan pada kelompok buruh, karyawan dan pegawai serta kenaikan pada kelompok tenaga kerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar dan pekerja keluarga/ tidak dibayar. Kelompok pekerja ini dimungkinkan merupakan pekerja yang mengalami dampak pandemi akibat pengurangan jumlah pekerja atau penduduk yang masuk ke angkatan kerja dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga yang terdampak pandemi. Kelompok tenaga kerja ini diduga bukan merupakan kelompok yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan berupaya untuk menyambung hidup dengan membuat usaha baru dan masih berskala mikro. Kelompok usaha ini mungkin luput dari alokasi PEN untuk UMKM karena program yang ada ditujukan untuk memberikan keringanan dan bantuan kepada UMKM yang sudah beroperasi dan memiliki performa usaha yang baik (misalnya bantuan subsidi bunga dan restrukturisasi pinjaman). Oleh karena itu, kelompok ini merupakan kelompok yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

Peran Penting Pemerintah Melalui Stimulus dan Bantuan dalam Program PEN

Pada tahun 2021, pemerintah menganggarkan Rp699,43 triliun untuk PEN. Sebesar 27,3% digunakan untuk dukungan terhadap korporasi dan UMKM, 25,1% untuk dukungan kesehatan, 21,6% untuk perlindungan sosial serta program prioritas dan insentif usaha masing-masing sebesar 17,9% dan 8,1%. Sampai dengan Agustus 2021, terlihat bahwa stimulus untuk usaha merupakan salah satu alokasi yang paling baik penyerapannya (81,4%). Selain itu, realisasi untuk bantuan korporasi dan UMKM juga tercatat sudah mencapai 34,4%. Dengan performa ini, diharapkan sektor usaha menjadi lebih menggeliat dan sisi permintaan tenaga kerja juga terjaga. Dengan perkembangan ini, diharapkan pada paruh kedua 2021 ini, besarnya TPT akan dapat terjaga dan menahan laju jumlah pekerja terdampak pandemi yang diperkirakan tidak akan jauh lebih tinggi dari pada Agustus 2020.

Masih berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia, pemerintah juga masih memberikan subsidi upah sebesar Rp1 juta kepada pekerja di sektor swasta yang merupakan peserta aktif BP Jamsostek dengan gaji/ upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Upaya ini dimaksudkan agar pekerja dapat melakukan *smoothing consumption* untuk menjaga daya beli masyarakat. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan merealisasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini menawarkan manfaat berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan, setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BP Jamsostek dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP. Diharapkan, program ini juga dapat bermanfaat dalam menjaga tingkat konsumsi kelompok masyarakat yang terkena PHK

Komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan terutama dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan stimulus untuk dunia usaha diharapkan akan menekan laju kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.

sembari meningkatkan kemampuan dalam rangka bersiap mencari pekerjaan baru atau membuka usaha baru.

Pada tahu 2021, pemerintah juga tetap fokus dalam menjaga daya beli masyarakat kelas bawah dengan tetap memberikan berbagai bantuan dalam rangka perlindungan sosial, seperti PKH, Kartu Sembako, BST, BLT, Kartu Prakerja, Bantuan Kuota Internet dan Subsidi Listrik. Sampai dengan Agustus 2021, realisasi untuk perlindungan sosial ini sudah mencapai 50,8%. Diharapkan, bantuan pemerintah ini akan mampu menahan laju kemiskinan dan ketimpangan pada paruh kedua 2021.

Referensi:

BPS, 2021. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021

BPS, 2021. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2021

LPEM FEB UI dan Himbara, 2020. Dampak Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap UMKM.